

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, G. A., & Kapojos, P. M. (2023). Penerapan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 11(4), 133-151.
- Ante, E., Benu, N., & Moniaga, V. (2016). Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan Di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Timohon. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 12 (3), 113-124.
- Appraisal Institute. (2013). The Appraisal Of Real Estate Fourteenth Edition. Dalam A. Institute, *The Appraisal Of Real Estate Fourteenth Edition* (hal. 295-335). Amerika Serikat: Appraisal Institute.
- Hariyanto, T. (2007). Konsep Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Indonesia Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Geografi UNNES*, 4 (1), 1-10.
- Harjanto, B., & Hidayati, W. (2003). *Konsep Dasar Penilaian Properti Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Hartati, S., Martini, R., & Winarko, H. (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 3 (1), 40-51.
- Hasransyah, G., Asmapane, S., & Diyanti, F. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Journal FEB UNMUL*, 14(1), 31-39.
- Hidayati, W., & Harjanto, B. (2016). *Konsep Dasar Penilaian Properti Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- KEPI dan SPI. (2018). *Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilai, Edisi VII*. Jakarta: MAPPI.
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2008). *Prinsip Prinsip Pemasaran Jilid 1 Edisi 12*. Jakarta: Erlangga.
- Lahamendu, V. (2015). Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Lahan Yang Berkelanjutan Di Pulau Bunaken Manado. *Jurnal UNSRAT*, 7 (1), 383-388.
- Mulyadi. (2015). *Akuntansi Biaya, Edisi 5*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

- Nasution, D. D., Supraja, G., & Damanik, A. F. (2022). PENGUKURAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN DELI SERDANG. *Jurnal Dharmawangsa*, 16 (3), 613-623.
- Nurrahma, A., Darsono, & Barokah, U. (2024). Analisis Faktor - Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Kabupaten Klaten . *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Volume 8 Nomor 1, 192-202.
- Prawoto, A. (2015). *Teori dan Praktek Penilaian Properti Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPFE.
- Rachmatullah, T., & Idajati, H. (2016). Tingkat Deviasi Konversi Lahan di Kawasan Lindung Kelurahan Wonorejo Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 5 (1), 29-32.
- Ramadhani, R. (2021). Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, 2 (1), 31-40.
- Ritohardoyo, S. (2013). *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Yogyakarta: Ombak.
- Siregar, D. (2004). *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suciyani, W. O. (2013). Optimasi Pemanfaatan Aset Pemerintah sebagai Upaya Revitalisasi Kawasan Alun-Alun Kota Bandung. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 9(2), 144-151.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Sujono, B. (2011). Penilaian Asset Dalam Sektor Properti. *Jurnal UNDIP, Modul Vol. 11 No. 1*, 37-40.
- Sulistiowati, S., Ismail, N., & Rahman, T. (2020). Status Kepemilikan Dan Pemanfaatan Tanah Grondkaart Di Stasiun Depok Baru, Lenteng Agung, Dan Tanjung Barat. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50 (4), 1007-1048.
- Supriyati. (2016). *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah Berbasis Akuntansi dan Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Sutedi, A. (2009). *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

- Tika, M. (2010). *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Uchiyani F, R., & Ani, S. (2012). Tren Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten. *Jurnal SEPA, Volume 8 No.2*, 51-58.
- Wahyudi, W. W., Triana, E., & Tou, H. J. (2020). Arahana Pengembangan Wilayah Berbasis Produk Unggulan. *Jurnal Rekayasa, 10 (1)*, 32-44.
- Wirabrata, A., & Surya, T. (2011). Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 2 (2)*, 729-752.